

---

## POSKOLONIAL: SEBUAH PEMBAHASAN

---

Oleh Nurhadi

### A. Bidang Kajian Poskolonial

Poskolonial sebagai sebuah kajian muncul pada 1970-an. Studi poskolonial di Barat salah satunya ditandai dengan kemunculan buku *Orientalisme* (1978) karya Edward Said yang kemudian disusul dengan sejumlah buku lainnya yang masih terkait dengan perspektif Barat dalam memandang Timur. Buku-buku Said seperti *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World* (1981) dan *Culture and Imperialism* (1993) merupakan sekuel dari buku *Orientalisme* tersebut. Buku semacam *The Empire Writes Back* (1989) suntingan Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, dan Helen Tiffin merupakan buku lain yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan teori poskolonial.

Teori poskolonial itu sendiri merupakan sebuah seperangkat teori dalam bidang filsafat, film, sastra, dan bidang-bidang lain yang mengkaji legalitas budaya yang terkait dengan peran kolonial. Bidang ini bukanlah menjadi monopoli kajian sastra. Poskolonial mirip dengan kajian feminisme yang meliputi bidang kajian humaniora yang lebih luas; sejajar dengan kajian posmodern atau postrukturalisme.

Dalam bidang sastra, teori poskolonial merupakan salah satu dari serangkaian munculnya kajian atau teori setelah kemapanan teori strukturalisme mulai dipertanyakan. Seperti telah diketahui oleh umum bahwa dalam sejarahnya teori sastra yang mula-mula yaitu teori mimesis pada zaman Plato di Yunani Kuno. Perkembangan berikutnya yaitu teori pragmatis pada zaman Horace dari Romawi abad ke-4 yang disusul dengan teori yang berorientasi pada ekspresionisme pada abad ke-19. Pada abad ke-20 teori-teori yang berorientasi pada strukturalisme mendominasi kajian sastra. Pada paruh abad ke-20, teori-teori strukturalisme yang mendasarkan kajiannya hanya sebatas objek sastra itu telah mencapai puncaknya. Perkembangan teori sastra selanjutnya, berputar haluan dan dalam kecepatan yang luar biasa memunculkan sejumlah teori-teori yang seringkali satu sama lain saling berseberangan dan saling mengisi.

Pada paruh akhir abad ke-20, selain strukturalisme yang mengkaji karya sastra hanya berdasarkan strukturnya, ada juga sejumlah kajian atau teori sastra yang melibatkan unsur kesejarahannya dan konteks sosialnya. Teori-teori seperti cultural studies, new historisisme, dan poskolonial untuk sekedar menyebut contoh merupakan kajian-kajian sastra yang menganalisis karya sastra dalam konteks kesejarahannya ataupun konteks sosialnya. Poskolonial merupakan kajian terhadap karya-karya sastra (dan bidang yang lain) yang berkaitan dengan praktik kolonialisme atau imperialisme baik secara sinkronik maupun diakronik. Kajian poskolonial berusaha membongkar selubung praktik kolonialisme di balik sejumlah karya sastra sebagai superstruktur dari suatu kekuasaan, kekuasaan kolonial. Sastra dipandang memiliki kekuatan baik sebagai pembentuk hegemoni kekuasaan atau sebaliknya sebagai konter hegemoni.

## **B. Kolonialisme/Orientalisme**

Seperti yang diungkap Said dalam *Orientalisme*, ada sejumlah karya sastra dalam dunia Barat yang turut memperkuat hegemoni Barat dalam memandang Timur (Orient). Sejumlah karya seni itu telah melegitimasi praktik kolonialisme bangsa Barat atas kebudayaan Timur. Penjajahan adalah sesuatu yang alamiah, bahkan semacam tugas bagi Barat untuk memberadabkan bangsa Timur. Kajian Said ini memang berangkat dari teori hegemoni Gramscian dan teori diskursus Foucaultian. Kata “post” yang dilekatkan dengan kata “colonial” sebetulnya kurang tepat kalau diindonesiakan menjadi “pasca”. Kasus ini mirip dengan pengindonesiaan kata “discourse” dalam istilah Foucault yang tidak sama persis maknanya dengan kata “wacana”. Ada kekhususan.

Kata pascakolonial yang seringkali dijadikan terjemahan dari postcolonial merupakan istilah yang mengacu pada permasalahan “waktu setelah” kolonial. Padahal poskolonial tidak hanya mengacu pada kajian sastra sesudah masa era penjajahan, atau era kemerdekaan tetapi lebih luas mengacu pada segala yang terkait dengan kolonialisme yang pada abad ke-21 hanya menyisakan Amerika sebagai bangsa penjajah yang kesiangan. Konteks poskolonialisme juga mencakup kasus globalisasi dan perdagangan bebas yang seringkali dianggap sebagai bentuk neokolonialisme. Kata post sebaiknya diartikan sebagai “melampaui” sehingga poskolonial adalah kajian

yang melampaui kolonialisme, artinya bisa berupa pasca atau permasalahan lain yang masih terkait meskipun tampak seperti terpisah dari kolonialisme.

Jangkauan luar biasa imperialisme Barat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan salah satu fakta yang paling menakjubkan dalam sejarah politik. Melalui penafsirannya yang yang brilian atas kanon-kanon Barat seperti *Heart of Darkness* (karya Conrad), *Mansfield Park* (karya Austen), dan *Aida* (komposisi musik karya Verdi), Said menunjukkan bagaimana kebudayaan dan politik bekerja sama. Sebuah konsep dasar yang dipaparkan pemikir Komunis Italia, Antonio Gramsci tentang hegemoni yang menyatakan bahwa kekuasaan terbangun atas dominasi (senjata) dan hegemoni (kebudayaan).

Menurut Said, kebudayaan dan politik pada kasus kolonialisme telah bekerja sama, secara sengaja ataupun tidak, melahirkan suatu sistem dominasi yang melibatkan bukan hanya meriam dan serdadu tetapi suatu kedaulatan yang melampaui bentuk-bentuk, kiasan dan imajinasi penguasa dan yang dikuasai. Hasilnya adalah suatu visi yang mengaskan bahwa bangsa Eropa bukan hanya berhak, melainkan wajib untuk berkuasa. Argumen utama dosen kritik sastra Universitas Columbia AS ini adalah bahwa kekuasaan imperial Barat selalu menemui perlawanan terhadap imperium. Lelaki keturunan Palestina ini menelaah kesalingketergantungan wilayah-wilayah kultural tempat kaum penjajah dan terjajah hidup bersama dan saling berperang, dan melacak kisah-kisah “perlawanan” dalam diri para penulis poskolonial seperti Fanon, C.L.R. James, Yeats, Chinua Achebe, dan Salman Rusdhie.

Dalam dunia poskolonial sekarang ini, Said mengajukan sanggahan terhadap argumen-argumen yang mengatakan bahwa kebudayaan dan identitas nasional adalah entitas-entitas yang tunggal dan murni seperti yang dipaparkannya dalam buku *Culture and Imperialism* (yang diindonesiakan oleh Penerbit Mizan menjadi *Kebudayaan dan Kekuasaan*). Dengan melucuti pengertian “kita” dan “mereka” dari imperium, Said menunjukkan bagaimana asumsi-asumsi imperialis yang busuk terus mempengaruhi politik dan kebudayaan Barat, sejak peliputan media atas Perang Teluk hingga pengajaran sejarah dan kesusastraan di sekolah-sekolah.

Apa yang dilakukan Said dalam sejumlah bukunya dalam menelanjangi praktik-praktik poskolonial tersebut selain berangkat dari teori hegemoni sebetulnya juga

berawal dari konsep diskursus-nya Foucault. Dalam pengertian intelektual Prancis yang tampil plontos ini, diskursus (yang sering diindonesiakan menjadi wacana) adalah cara menghasilkan pengetahuan, beserta praktik sosial yang menyertainya, bentuk subjektivitas yang terbentuk darinya, relasi kekuasaan yang ada di balik pengetahuan dan praktik sosial tersebut, serta saling keterkaitan di antara semua aspek ini. Dengan cakupan pengertian seperti ini, Foucault menulis salah satu judul bukunya dengan *Power/Knowledge*, kekuasaan dan pengetahuan seperti dua sisi mata uang. Kekuasaan (dan sekaligus pengetahuan) bukanlah sebuah entitas atau kapasitas yang dapat dimiliki oleh satu orang atau lembaga, melainkan sebuah jaringan yang tersebar di mana-mana dan selalu bergerak atau bergeser. Orientalisme yang diungkap oleh Edward Said adalah satu bentuk “knowledge” dalam rangka mengukuhkan kekuasaan (power) kolonialisme. Sejak itu, di Barat orang tidak mau lagi diberi predikat orientalis bagi intelektual yang melakukan studi kawasan Asia-Afrika. Kata “orientalis” telah menjadi kata peyoratif.

### **C. Cakupan dan Tokoh-tokoh Kajian Poskolonial**

Poskolonial merupakan sebuah kajian yang relatif luas dan baru. Apa sajakah yang menjadi cakupan pembicaraannya, siapa saja tokoh-tokohnya, dan pengarang manakah yang tergolong sebagai pengarang poskolonial? Kutipan dari situs [www.english.emory.edu](http://www.english.emory.edu) berikut ini dapat memberikan gambaran sekilas atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Perihal topik-topik utama atau *major issues* yang dikemukakan situs tersebut atas poskolonial adalah sebagai berikut.

Despite the reservations and debates, research in Postcolonial Studies is growing because postcolonial critique allows for a wide-ranging investigation into power relations in various contexts. The formation of empire, the impact of colonization on postcolonial history, economy, science, and culture, the cultural productions of colonized societies, feminism and postcolonialism, agency for marginalized people, and the state of the postcolony in contemporary economic and cultural contexts are some broad topics in the field.

The following questions suggest some of the major issues in the field: How did the experience of colonization affect those who were colonized while also influencing the colonizers? How were colonial powers able to gain control over so large a portion of the non-Western world? What traces have been left by colonial

education, science and technology in postcolonial societies? How do these traces affect decisions about development and modernization in postcolonies? What were the forms of resistance against colonial control? How did colonial education and language influence the culture and identity of the colonized? How did Western science, technology, and medicine change existing knowledge systems? What are the emergent forms of postcolonial identity after the departure of the colonizers? To what extent has decolonization (a reconstruction free from colonial influence) been possible? Are Western formulations of postcolonialism overemphasizing hybridity at the expense of material realities? Should decolonization proceed through an aggressive return to the pre-colonial past (related topic: [Essentialism](#))? How do gender, race, and class function in colonial and postcolonial discourse? Are new forms of imperialism replacing colonization and how?

Along with these questions, there are some more that are particularly pertinent to postcolonial literature: Should the writer use a colonial [language](#) to reach a wider audience or return to a native language more relevant to groups in the postcolony? Which writers should be included in the postcolonial canon? How can texts in translation from non-colonial languages enrich our understanding of postcolonial issues? Has the preponderance of the postcolonial [novel](#) led to a neglect of other genres?

Adapun tokoh-tokoh dalam kajian poskolonial baik dalam bidang sastra, film maupun dalam kritik poskolonial, situs tersebut menyatakan data nama-nama sebagai berikut.

Some of the best known names in Postcolonial literature and theory are those of Chinua Achebe, Homi Bhabha, [Buchi Emecheta](#), [Frantz Fanon](#), [Jamaica Kincaid](#), [Salman Rushdie](#), Wole Soyinka, and [Gayatri Chakravorty Spivak](#). A more comprehensive although by no means exhaustive list follows.

**LITERATURE:** Chinua Achebe, Ama Ata Aidoo, Peter Abrahams, Ayi Kwei Armah, [Aime Cesaire](#), John Pepper Clark, [Michelle Cliff](#), [Jill Ker Conway](#), [Tsitsi Dangarembga](#), Anita Desai, [Assia Djebar](#), Marguerite Duras, [Buchi Emecheta](#), Nuruddin Farah, [Amitav Ghosh](#), Nadine Gordimer, [Bessie Head](#), [Merle Hodge](#), C.L.R. James, Ben Jelloun, Farida Karodia, [Jamaica Kincaid](#), [Hanif Kureishi](#), [George Lamming](#), Dambudzo Marechera, Rohinton Mistry, Ezekiel Mphahlele, V. S. Naipaul, [Taslina Nasrin](#), [Ngugi Wa Thiong'o](#), [Flora Nwapa](#), Grace Ogot, Molara Ogundipe-Leslie, Gabriel Okara, Ben Okri, [Michael Ondaatje](#), [Arundhati Roy](#), [Salman Rushdie](#), Simone Schwarz-Bart, Allan Sealy, [Shyam Selvadurai](#), Leopold Senghor, [Vikram Seth](#), [Bapsi Sidhwa](#), Wole Soyinka, Sara Suleri,

[M.G.Vassanji](#), [Derek Walcott](#), etc.

**FILM:** Shyam Benegal, Gurinder Chadha, Claire Denis, Shekhar Kapoor, Srinivas Krishna, Farida Ben Lyazid, Ken Loach, [Deepa Mehta](#), Ketan Mehta, [Mira Nair](#), Peter Ormrod, Horace Ove, Pratibha Parmar, Satyajit Ray, Mrinal Sen, [Ousmane Sembene](#), etc.

**THEORY:** Aijaz Ahmad, Kwame Anthony Appiah, Bill Ashcroft, Homi Bhabha, Amilcar Cabral, [Partha Chatterjee](#), [Rey Chow](#), [Frantz Fanon](#), Gareth Griffiths, Ranajit Guha, Bob Hodge, Abdul JanMohamed, Ania Loomba, Trinh T. Minh-ha, Vijay Mishra, Chandra Talpade Mohanty, Arun Mukherjee, [Ngugi Wa Thiong'o](#), Benita Parry, [Edward Said](#), Kumkum Sangari, Jenny Sharpe, Stephen Slemon, [Gayatri Chakravorty Spivak](#), Aruna Srivastava, Sara Suleri, Gauri Viswanathan, Helen Tiffin, etc.

Dari kutipan di atas tampaknya tidak ada seorang pun tokoh, baik dalam bidang sastra, film maupun teori yang berkebangsaan Indonesia. Padahal titik tolak kebangkitan poskolonial berasal dari Bandung Indonesia, yakni dengan adanya Konferensi Asia Afrika yang pertama yang diselenggarakan di Bandung tahun 1955. Konferensi ini sangat monumental. Ketiadaan nama/tokoh asal Indonesia ini disebabkan karena aspek kebahasaan yang menjadi kendala utamanya. Tampaknya sejumlah tokoh-tokoh poskolonial tersebut diproduksi dan direproduksi dalam bahasa Inggris atau Prancis yang notabene adalah bahasa kolonial.

Meski demikian, sejumlah buku poskolonial telah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Selain buku-buku Edward Said, buku-buku poskolonial lain yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya karya Leela Gandhi (*Teori Poskolonial, Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*, 2001), Ania Loomba (*Kolonialisme/ Pascakolonialisme*, 2003), Bill Ashcroft dkk (*Menelanjangi Kuasa Bahasa: Teori dan Praktik Sastra Poskolonial*, 2003). Selain itu ada sejumlah penulis Indonesia yang juga menerbitkan buku dengan topik poskolonialisme, salah satunya Faruk dengan bukunya yang berjudul *Belunggu Pasca-Kolonial* (2007) dan Muhidin M. Dahlan (penyunting) dengan judul *Postkolonial Sikap Kita terhadap Imperialisme* (2001).

Dalam buku *The Empire Writes Back* (1989) suntingan Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, dan Helen Tiffin (yang diindonesiakan Penerbit Qalam menjadi *Menelanjangi*

*Kuasa Bahasa*, 2003) terdapat sejumlah tema-tema terkait dengan kajian poskolonial ini. Selain buku ini, ketiga penulis ini juga mengeditori sebuah buku yang sering dijadikan rujukan meski belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yakni *The Postcolonial Studies Reader* (1995). Adapun dalam *The Empire Writes Back* setidaknya ada tema-tema sebagai berikut.

#### **D. The Empire Writes Back**

Buku ini terdiri atas lima bab yang diawali dengan sebuah pendahuluan dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Ada dua hal yang dilakukan dalam buku ini yaitu: 1) mengidentifikasi cakupan dan sifat-sifat dasar teks-teks poskolonial; 2) mendeskripsikan beragam teori yang hingga kini telah banyak muncul untuk menjelaskannya. Kedua hal ini dibicarakan dalam bab 1 hingga bab 3. Sementara itu, buku ini juga bertujuan untuk: 1) menjelaskan sifat dasar teori-teori poskolonial yang ada; 2) cara bagaimana teori-teori tersebut berinteraksi dengan dan membongkar asumsi-asumsi yang dibangun teori-teori Eropa. Kedua hal ini dibicarakan pada bab 4 dan bab 5 buku ini.

Secara keseluruhan, kelima bab buku ini terdiri atas: 1) “Mengurai Dasar-Dasar Pijakan: Model-Model Kritis Kajian Kesusastraan Poskolonial” (menguraikan perkembangan model-model deskriptif yang ada dalam kajian karya-karya poskolonial); 2) “Menempatkan Kembali Bahasa: Strategi-Strategi Tekstual Tulisan Poskolonial” (membahas proses bagaimana bahasa sengaja diserap untuk menciptakan suatu praktik diskursif yang baru dan berbeda); 3) Menempatkan Kembali Teks: Pembebasan Tulisan Poskolonial” (membahas pembacaan simptomatik terhadap teks-teks poskolonial, tulisan poskolonial berkaitan erat dengan praktik-praktik sosial dan material kolonialisme); 4) “Teori di Persimpangan Jalan: Teori-Teori Pribumi dan Pembacaan Poskolonial” (menguraikan persoalan-persoalan dalam perkembangan teori-teori poskolonial pribumi); dan 5) “Menempatkan Kembali Teori: Tulisan Poskolonial dan Teori Kesusastraan” (membicarakan implikasi-implikasi lebih luas poskolonial terhadap teori sastra dan analisis sosial politik).

Karya-karya poskolonial (seperti dipaparkan dalam **bab 1**) memiliki karakteristik yang khas sehingga para kritikus akhirnya mengembangkan model-model kajian yang

secara garis besar dibedakan atas empat model. Model-model kajian poskolonial inilah yang menjadi topik bab 1 buku ini. Keempat model kajian yang dimaksud yaitu: 1) model 'nasional' atau regional yang menekankan pada pendeskripsian berbeda akan berbagai hal yang berkaitan dengan kebudayaan nasional atau regional; 2) model berbasis ras yang mengidentifikasi ciri-ciri tertentu yang sama-sama terdapat pada berbagai kesusastraan nasional, seperti warisan rasial yang biasa ditemukan dalam karya sastra diaspora Afrika yang dikenal dengan model '*Black Writing*'; 3) model perbandingan yang menjelaskan ciri-ciri linguistik, historis, dan kebudayaan tertentu yang melintasi dua atau lebih kesusastraan poskolonial dengan cara memperbandingkannya; 4) model perbandingan yang lebih luas, yang lebih menonjolkan pada aspek-aspek hibriditas dan sinkretisitas sebagai elemen pembentuk utama keseluruhan kesusastraan poskolonial.

Dalam **bab 2** buku ini, "Menempatkan Kembali Bahasa: Strategi-Strategi Tekstual Tulisan Poskolonial" tercakup hal-hal yang berkaitan dengan: 1) *abrogasi* dan *apropriasi*, 2) bahasa dan *abrogasi*, 3) kontinum kreole, 4) fungsi metonimik perbedaan bahasa, dan 5) strategi-strategi *apropriasi* dalam tulisan poskolonial. Pengertian *abrogasi* itu sendiri menyaran pada penolakan terhadap hak-hak istimewa yang diklaim 'bahasa Inggris' (dengan // kapital yang melambangkan bahasa kolonial), termasuk penolakan terhadap kekuasaan metropolitan yang tertanam melalui sarana-sarana komunikasi. Sementara pengertian *apropriasi* yaitu pembentukan kembali bahasa pusat metropolitan tersebut. Proses ini mencakup penerapan dan pembentukan ulang bahasa tersebut ke dalam bentuk-bentuk pemakaian baru yang sekaligus menunjukkan perpisahannya dari status privilese kolonial.

Pendukung gerakan Rastafaria di Jamaika berusaha 'merekonstruksi' apa yang mereka sebut sebagai struktur kekuasaan bahasa Inggris, yakni struktur-struktur yang di dalamnya bersarang kontrol metonimik hegemonik yang dipraktikkan orang Inggris atas warga kulit hitam sepanjang sejarah Karibia dan Afrika. Kaum Rastafaria, menurut Joseph Owens, mengadopsi bermacam-macam strategi yang dapat digunakan untuk 'membebaskan' bahasa dari dalam. Meski basis ujaran Rasta adalah kreole Jamaika, secara sengaja ia telah diubah menjadi sejumlah cara ujaran. Kaum Rastrafarian menekankan penggunaan kata 'saya' dalam bahasa Inggris, '*I*', untuk kata ganti



personal dalam semua posisi seperti '*I-and-I*' untuk kata '*we*', juga untuk kata '*my*' atau '*I-self*', '*I-n-I self*' untuk kata ganti personal refleksif, dan khususnya kata '*me*' yang terkesan merendahkan diri.

Novel-novel Tutuola membongkar asumsi yang telah diterima secara luas bahwa pandangan-pandangan dunia asing akan menjadi semakin dekat jika struktur-struktur linguistik mereka dikacaukan. Gambaran ini tampak lebih jelas dan lebih disadari dalam karya Gabriel Okara, *The Voice*. Ia berupaya mengawinkan sintaksis bahasa sukunya (Ijaw) dengan bentuk-bentuk leksikal bahasa Inggris.

Meski dianggap sebagai materi linguistik yang kurang jelas, penggabungan sintaksis menjadi hal yang umum dalam tulisan-tulisan poskolonial. Masyarakat multilingual seperti Papua Nugini, misalnya, menyediakan sumber yang sangat kaya bagi usaha penciptaan variasi sintaksis.

**Bab 3**, "Menempatkan Kembali Teks: Pembebasan Tulisan Poskolonial", membicarakan sejumlah karya-karya dari penulis poskolonial dalam kaitannya dengan sejumlah topik. *The Conquest of America* (1974) karangan Tzvetan Todorov merupakan contoh yang paling tepat tentang analisis wacana yang secara langsung dapat menunjukkan fungsi dan kekuatan tulisan dalam situasi kolonial. Gagasan revolusioner buku Todorov ini terletak pada penjelasannya bahwa kontrol kolonial sebenarnya terjadi melalui kontrol atas sarana-sarana komunikasi, ketimbang melalui penguasaan terhadap hak hidup, hak milik, maupun bahasa itu sendiri. Rahasia kesuksesan tentara Cortez menaklukkan bangsa Aztec di Amerika Tengah terletak pada keberhasilan orang-orang Spanyol itu menguasai sarana komunikasi bangsa Aztec sejak awal.

Novel *Mating Birds* (1986) karya Lewis Nkosi merupakan contoh yang baik guna menunjukkan persepsi poskolonial tentang hubungan antara pengetahuan dan kontrol kekuasaan. Meski menempatkan dirinya dalam wacana resistensi dan abrogasi, novel ini sekaligus memberikan gambaran yang tepat tentang kebungkaman atau kebisuan masyarakat, yang kepadanya masyarakat sebenarnya diarahkan, baik oleh kondisi-kondisi kultural Afrika Selatan sendiri maupun negara atas sarana-sarana komunikasi yang ada. Novel tersebut bercerita tentang cobaan berat yang harus ditanggung seorang lelaki kulit hitam Afrika Selatan karena kasus pemerkosaan yang dilakukannya terhadap seorang wanita kulit putih.

Penulis Trinidad, V.S. Naipaul, sering mengamati dilema yang harus dihadapi para penulis poskolonial dalam karya-karyanya, khususnya dalam *The Mimic Men* (1967). Naipaul merasa pesimis bisa keluar dari situasi ini. Dia melihat mimikri yang implisit dalam kondisi poskolonial, dan dengan demikian, dalam teks-teks kesusastraannya, sebagai hal yang akan terus mengganggu. Hal ini disebabkan karena konsep ketidakteraturan dan ketidakotentikan yang terus menerus dipaksakan oleh pusat pada wilayah-wilayah pinggiran atau marjinal.

Timothy Findley dalam karyanya yang berjudul *Not Wanted on the Voyage* membicarakan tentang ke-lain-an (*otherness*) yang radikal dan hibriditas. Pengarang Kanada ini merujuk pada sumber-sumber sejumlah praktik Barat yang krusial dalam kolonialisme dan imperialisme, hal-hal yang oleh Gayatri Spivak disebut dengan istilah '*othering*'. Hal ini mencakup asumsi tentang otoritas, 'suara', dan kontrol atas 'kata', yakni perampasan dan penguasaan sarana-sarana interpretasi dan komunikasi. Dalam banyak teks poskolonial, hal di atas dilakukan dengan cara 'menuliskan kembali' cerita-cerita kanonik.

Findley memperluas metode 'penulisan kembali' pusat kekuasaan ini melalui penulisan ulang cerita biblika, Noah dan Banjir Besar, mitos utama dalam peradaban Barat tentang pengrusakan dan penyelamatan—pengrusakan mayoritas dan penyelamatan sedikit pihak. Ketahanan atau keselamatan suatu sistem, peradaban atau tradisi semacam itu sebagai hal yang otoritatif telah menghalangi perkembangan 'si lain'. Munculnya kebudayaan juga melibatkan penindasan dan atau peniadaan secara aktif terhadap bentuk-bentuk '*otherness*'. Ia mematikan bentuk-bentuk atau mode-mode alternatif lainnya. Dalam interogasi Findley yang radikal tentang kisah banjir tersebut, mitos besar tentang penyelamatan berubah menjadi sebuah kisah pengrusakan atas nama kebenaran minoritas dan penyebaran kekuasaan yang picik.

Pada bagian lain bab ini juga diuraikan konsep apropriasi marjinalitas seperti yang terdapat dalam novel *The Edge of Alphabet* karya Janet Frame yang berkisah perjalanan tiga orang anak manusia yang bertemu di sebuah kapal yang berlayar dari Selandia Baru ke London, ketiganya membentuk suatu persilangan wacana-wacana marjinalitas yang berbeda. Selain itu, juga dibicarakan novel *The Vendor of the Sweet* karya R.K. Narayan dalam topik apropriasi kerangka kekuasaan.

Pembahasan atas sejumlah karya-karya poskolonial dengan beragam latar belakang seperti dipaparkan dalam bab 3 ini merupakan pembacaan simptomatik yang memfokuskan perhatian pada sentralitas bahasa dan beragam proses bagaimana binerisme pusat—pinggiran itu sendiri diruntuhkan oleh proses-proses abrogasi dan apropriasi yang saling melengkapi satu sama lain.

**Bab 4**, “Teori di Persimpangan Jalan: Teori Pribumi dan Bacaan Poskolonial”, menguraikan sejumlah kasus negara-negara ‘poskolonial’ yang pernah atau bahkan masih memiliki elemen-elemen kebudayaan ‘asli’-nya: 1) teori-teori kesusastraan India (dan negara sekitarnya yang memiliki pengaruh bahasa Sanskerta); 2) teori-teori kesusastraan Afrika (baik negara-negara *Anglophone* atau jajahan Inggris maupun negara-negara *Francophone* atau jajahan Prancis); 3) daerah-daerah koloni hunian seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru; 4) teori-teori Karibia. Ada pertanyaan menarik ketika Bill Aschroft memasukkan karya-karya pengarang Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru atau negara lain yang berkulit putih dalam konteks poskolonial. Bukankah mereka juga bagian dari pusat dominasi kolonial (Eropa)? Bahkan kini Amerika Serikat malah telah mengambil alih dominasi Eropa dan menjadi trend-setter kebudayaan dunia.

**Bab 5**, “Menempatkan Kembali Teori: Tulisan Poskolonial dan Teori Kesusastraan”, mengaitkan teori poskolonial dalam kaitannya dengan berbagai bidang kajian lainnya seperti dengan posmodernisme, *new criticism*, teori wacana, teori ideologi, marxisme, feminisme, dan lainnya. Selain itu juga dibicarakan mengenai rekonstruksi poskolonial atas kesusastraan, makna, dan nilai, serta poskolonial sebagai strategi pembacaan.

Sebagai strategi pembacaan, teks-teks poskolonial melakukan subversi atau rekonstruksi atas teks-teks kanon yang telah ditanamkan dalam struktur-struktur institusional seperti kurikulum pendidikan dan jaringan-jaringan penerbitan. Pembacaan kembali atas *The Tempest* karya Shakespeare yang notabene merupakan cerita perumpamaan tentang imperialisme transatlantik atau kolonisasi Barat dilakukan oleh sejumlah penulis poskolonial seperti George Lamming (*The Pleasure of Exile*, 1960), Aimé Césaire, maupun Jonathan Miller. Pembacaan semacam ini tidak hanya terbatas pada *The Tempest*, tetapi juga pada karya-karya kanon Eropa lainnya seperti *Robinson*

*Crusoe* karya Daniel Defoe, *Divine Comedy* karya Dante, *Jane Eyre* karya Charlotte Bronte, dan *Mansfield Park* karya Jane Austen oleh sejumlah penulis poskolonial yang pada gilirannya menciptakan pandangan dunia yang berfungsi sebagai counter-wacana.

### **E. Kajian Poskolonial di Indonesia**

Dalam dunia akademik Indonesia, kajian poskolonial juga telah dipergunakan dalam menganalisis karya sastra Indonesia, khususnya di sejumlah universitas yang memiliki kajian sosial atau humaniora. Salah satu contoh yang ditulis oleh dosen FBS UNY ketika menyelesaikan program magisternya di UGM, yaitu analisis poskolonial terhadap roman *Salah Asuhan* (1928) karya Abdoel Moeis dan terhadap drama *9 Oktober 1740* (2005) karya Remy Sylado. Yang pertama ditulis oleh Yati Sugiarti dan yang kedua oleh Else Liliani.

Dalam temuan analisisnya, Yati Sugiarti menyatakan bahwa dalam novel *Salah Asuhan* relasi penjajah—terjajah bersifat hierarkhis dominatif dan terbilang menarik karena beberapa hal: (1) Hanafi bertindak sebagai subjek dalam menghadapi Rapihah, ibunya, dan masyarakat Minangkabau, (2) Hanafi sekaligus menjadi objek ketika berhadapan dengan Corrie dan masyarakat Eropa lainnya. Permasalahan identitas diri yang dihadapi Hanafi menyangkut empat hal: (1) Hanafi memandang dirinya, (2) orang lain memandang Hanafi, (3) hasrat Hanafi untuk menjadi sang lain, (4) tindakan Hanafi dalam pemenuhan hasratnya menjadi sang lain. Dalam proses menjadi sang lain yang notabene menjadi Belanda, Eropa, atau Barat, Hanafi yang berasal dari Minangkabau ini melakukan sejumlah mimikri (peniruan): (1) mimikri terhadap bahasa, (2) mimikri terhadap mata pencaharian, (3) mimikri terhadap gaya hidup, (4) mimikri terhadap sistem kemasyarakatan.

Sindrom Hanafi tampaknya tidak berakhir setelah Indonesia merdeka, bahkan ketika kita hidup di abad ke-21 ini. Mentalitas “budak” masih melekat dalam diri kita, kemudian mencoba “menjadi tuan” dengan sejumlah perilaku identitas. Lotion pemutih kulit dan operasi plastik laris manis di Indonesia gara-gara standar kecantikan hanya didasarkan atas kulit berwarna lebih putih dan hidung lebih mancung. Dua kriteria kecantikan yang distandarkan pada “tubuh orang Barat”. Kita mengejar “menjadi Barat”

untuk bisa dikategorikan cantik (juga tampan). Seringkali rambut dicat dengan warna pirang lalu menjadi “londo namun kepalanya doang”. Kontes-kontes ratu kecantikan merupakan salah satu bentuk pelegitimasi atas kecantikan “Barat”.

Dari cita rasa makanan, tampaknya kita sering mengejar “*western taste*”. Kita lebih memilih KFC ketimbang ayam Suharti, memilih pizza, lasagna, escargot yang didasari oleh pemikiran bahwa makanan itu makanan Eropa/Barat. Kita membeli statusnya. Dengan bisa menikmati cita rasa makanan Eropa seakan kita telah menjadi Eropa. Inilah yang oleh Peter L. Berger disebut dengan proses internalisasi atau identifikasi atas realitas objektif ke dalam realitas subjektif atau sebuah citraan realitas (*society in man*). Internalisasi mentalitas budak yang ingin menjadi sang tuan.

Untuk menjadi Barat seringkali kita terperangkap kasus mimikri ini. Tidak sedikit orang Indonesia yang mau “memperbaiki keturunan” dengan menikahi orang-orang Bule seperti yang dilakukan para selebritas kita. Pengajaran-pengajaran bahasa asing di Indonesia, jika tidak disadari kita bisa terperangkap sebagai bentuk kepanjangan tangan sang kolonial.

Pada abad ke-21 ini Jepang sebagai salah satu negara Asia telah menggeser orientasi ekspornya dari industri teknologi ke industri budaya. Mereka mengalihkan fokusnya tidak lagi pada industri otomotifnya tetapi lebih ke industri *content* seperti komik manga, kartun, film animasi, pop J-rock, makanan, fashion, dan bahasa Jepang. Di Indonesia, jangan ekspor budaya, ekspor kekayaan alamnya pun seringkali dibrokeri oleh pihak asing. Kita baru akan kebakaran jenggot setelah Malaysia mengklaim milik kita seperti dalam kasus lagu “Rasa Sayange” dan tari “Barongan”. Jangan terhadap aset budaya yang seringkali dipandang sebelah mata, wilayah teritorial seperti pulau Sipadan dan Ligitan pun kita tidak bisa mempertahankannya.

Kembali ke kasus temuan Yati Sugiarti terhadap roman *Salah Asuhan*. tampaknya Yati belum memaparkan peran teks *Salah Asuhan* tersebut (juga pengarangnya) dalam proses kolonialisasi. Hal ini terkait dengan diterbitkannya roman ini lewat Balai Pustaka, yang kala itu merupakan mesin hegemoni penguasa Belanda di wilayah jajahannya. Dalam sejarah penerbitannya ada peristiwa menarik, ketika Corrie yang dalam roman aslinya dikisahkan sebagai gadis Belanda kemudian diadopsi menjadi gadis Indo-Prancis.

Di pihak lain, Else Liliyani telah sampai pada kesimpulan dalam analisisnya terhadap naskah drama *9 Oktober 1740* bahwa teks ini (sekaligus Remy Sylado sebagai pengarangnya) bersikap ambivalen. Teks ini melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, tapi sekaligus terhegemoni oleh wacana-wacana kolonial. Kolonialisme dan kebangsaan (?) tidak dinilai sebagai kejahatan. Kejahatan yang sebenarnya berupa penyalahgunaan atas kewenangan yang dimiliki pejabat kolonial yang korup.

Kita tidak tahu persis mengapa Else menyatakan bahwa teks ini melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Bukankah posisi Belanda sekarang (buku ini diterbitkan 2005) sudah tidak signifikan lagi. Sebagai bentuk dampak masa lalu tentu saja Belanda telah melakukan praktik penjajahan. Akan tetapi dalam konteks kekinian, tampaknya Remy lebih membidik kasus etnis Cina yang dalam pergolakan sejarahnya di Indonesia seringkali dijadikan pemantik konflik. Fokus pembahasan ini sebenarnya lebih ditekankan pada masalah “the myth of native”. Masalah pribumi dan non-pribumi sebenarnya hanya sebuah mitos yang dibangun dengan sejumlah legitimasi. Etnis Cina diposisikan sebagai etnis non-pribumi yang seringkali mengalami kekerasan alienatif. Remy Sylado, dengan karya-karyanya yang lain, melakukan konter-hegemoni atau delegitimasi atas “the myth of native” tersebut.

## **F. Tantangan Poskolonialisme**

Berbicara tentang penjajah—terjajah seringkali tidak mudah dikategorikan. Australia kulit putih meskipun bagian dari jajahan Inggris, posisinya tidak sama dengan kaum Aborigin. Kanada yang kulit putih akan mempunyai posisi yang berbeda dengan India yang kulit berwarna, berbeda dengan penulis-penulis kulit putih Afrika Selatan (sebuah kelompok kecil di tengah mayoritas bangsa kulit hitam), juga dengan Singapura meskipun negara-negara tersebut sama-sama jajahan Inggris. Posisi yang sangat khusus dialami oleh Amerika Serikat, negara bekas jajahan Inggris yang kini menjadi negara adidaya. Amerika bukan lagi sebagai bangsa terjajah tetapi malah sebagai bangsa “penjajah kesiangan”. Bahkan bagi Eropa, pengaruh Amerika yang sering dinamai dengan gejala McDonalisasi dan Coca-colanisasi, adalah sebuah hegemoni yang perlu dinegosiasi.

Bagi Indonesia, bentuk penjajahan baru tidak hanya dilakukan oleh negara seperti Amerika dan negara kaya lainnya dalam membentuk blok perdagangan bebas yang lebih dikenal dengan globalisasi, tetapi juga oleh negara tetangga kecil seperti Singapura, atau lebih tepatnya malah oleh perusahaan-perusahaan transnasional seperti Microsoft, Exxon Mobile atau Temasek. Dalam kasus Temasek, perusahaan asal Singapura yang menguasai saham Indosat dan Telkomsel sekaligus ini telah melanggar praktik monopoli dalam dunia persaingan usaha telekomunikasi Indonesia. Marwan Batubara menuturkan analisisnya dalam *Republika* (via *Suara Muslim online*, 22/11/07) sebagai berikut.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Senin 19 November 2007 membacakan putusan tentang pelanggaran UU No 5 Tahun 1999, yang berkaitan dengan kepemilikan silang yang dilakukan oleh kelompok usaha Temasek (Temasek) dan praktik monopoli Telkomsel. Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa Temasek terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 27 huruf a UU No 5/1999.

Atas pelanggaran tersebut Temasek antara lain diperintahkan untuk melepas kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan, Indosat atau Telkomsel, membayar denda Rp 250 miliar dan menghentikan praktik pengenaan tarif tinggi dengan menurunkan tarif layanan seluler sekurang-kurangnya 15 persen.

Karena praktik monopoli yang dilakukan oleh Temasek, Majelis KPPU menghitung bahwa selama periode 2003-2006, konsumen layanan seluler di Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 14,76 triliun hingga Rp 30,80 triliun. Hal ini terjadi antara lain karena adanya kemampuan pengendalian yang dilakukan oleh Temasek terhadap Telkomsel dan Indosat yang menyebabkan melambatnya perkembangan Indosat sehingga tidak efektif bersaing dengan Telkomsel, yang berujung pada tidak kompetitifnya pasar industri seluler di Indonesia.

Lebih lanjut Marwan menyatakan praktik-praktik semacam ini merupakan bentuk baru dari penjajahan alias kolonialisme. Secara langsung, anggota DPD RI ini menyamakan praktik Temasek dengan VOC.

Keputusan KPPU membuka mata kita bahwa monopoli oleh Temasek telah merugikan pemakai layanan seluler, sekaligus merupakan bentuk pengisapan ala penjajah VOC masa lalu. Oleh sebab itu, kita sebagai konsumen sekaligus rakyat Indonesia juga sangat berkepentingan agar pihak-pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjaga serta menjamin terlaksananya keputusan tersebut.

Kita mencatat bahwa karena strategis dan menguntungkannya Indosat, Temasek tidak akan tinggal diam dan menghalalkan segala cara untuk

melakukan perlawanan. Hal ini telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu melalui kegiatan-kegiatan seminar, demonstrasi, black campaign, menakut-nakuti dan bluff publik, pemanfaatan pakar, pemanfaatan media, dan sebagainya. Ancaman dan bluff yang sering kita dengar antara lain adalah, "Di Indonesia tidak ada kepastian hukum", "Jika Temasek dinyatakan bersalah, investor akan lari", "Pemerintah akan digugat pada arbitrase internasional", "Kasus Karaha Bodas akan terulang", dan seterusnya. Hal ini tidak perlu dirisaukan dan harus kita hadapi bersama. Salah satu koran ibukota sempat memuat berita dengan judul 'Orang KPPU Sukses Tendang Investor Asing'. Di bawah judul berita tersebut tidak termuat secara utuh tentang latar belakang keputusan dan tidak pula dijelaskan dampak monopoli yang merugikan puluhan juta konsumen layanan seluler, dan puluhan triliun rupiah tersebut. Yang ada justru ancaman dan gertakan para pembela dan lawyer Temasek.

Selain menjelaskan kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh investasi Temasek asal Singapura dalam jaringan telekomunikasi seluler Indonesia, Marwan juga mengisahkan sejarah dan proses akuisisi Indosat lewat strategi bisnis yang tidak transparan. Marwan selanjutnya menyatakan hal-hal berikut.

Bagi kami mereka bukan investor asing, tapi penjajah asing. Inilah penjelasannya. Kita perlu mengingat kembali bagaimana Temasek melakukan manipulasi dan melanggar sekian banyak undang-undang saat mengakuisisi Indosat bulan Desember 2002 yang lalu. Mereka menggunakan perusahaan siluman ICL, yang didirikan di Mauritius. Mereka terlibat komplotan jahat dengan para oknum penguasa era Megawati dalam proses akuisisi tersebut, termasuk menggoreng harga saham sehingga memperoleh harga yang jauh lebih murah dari value Indosat sebenarnya. Mereka hanya membayar tidak sampai setengah dari value Indosat.

Setelah setahun, mereka menggadaikan saham Indosat untuk memperoleh pinjaman dari Standard Chartered Bank, agar bisa membayar utang, yaitu utang yang mereka buat saat membeli Indosat tahun 2002. Jadi, mereka tidak menggunakan modal sendiri seperti yang dipersyaratkan dalam dokumen tender. Setelah 3 tahun, sampai tahun kelima, mereka melakukan hedging dalam rangka mengurangi pembayaran pajak. Sebelum itu, mereka banyak membeli perangkat telekomunikasi dengan harga yang lebih mahal dibanding harga pasar atau harga yang dibayar oleh perusahaan seluler lain, dalam praktik transfer pricing. Ujung-ujungnya, penerimaan pajak negara menjadi turun, pelanggan seluler membayar lebih mahal, dan kita sebagai bangsa jadi objek pengisapan dan penjajahan.

Perhitungan kerugian sebanyak Rp 14,7 triliun hingga Rp 30,8 triliun bagi rakyat, menjelaskan kepada kita bahwa Temasek konsisten dengan sikapnya sejak dalam proses akuisisi Indosat, yakni melanggar berbagai peraturan dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Keputusan KPPU juga membuktikan kekhawatiran kami, yang tergabung dalam Iluni UI Jakarta,



akan timbulnya dampak negatif penguasaan sektor strategis dan vital ini oleh asing.

Pemerintah RI saat itu menjual Indosat karena ingin mengakhiri monopoli negara atas Telkom dan Indosat. Namun kemudian pemerintah menjual saham Indosat kepada Temasek yang saat itu sudah memiliki saham di Telkomsel. Sehingga terjadilah pengalihan monopoli oleh negara sendiri menjadi monopoli negara asing. Inilah yang kita sebut dengan 'logika keledai'. Kalau monopoli oleh negara sendiri, jika untuk melindungi kepentingan rakyat, apa salahnya?

Dalam era globalisasi sekarang ini, bentuk-bentuk eksploitasi itu tidak lagi dikuasai oleh negara asing sebagai state, tetapi seringkali oleh perusahaan-perusahaan transnasional yang kepemilikan sahamnya diperjualbelikan di pusat-pusat saham dunia, kantor pusatnya mungkin di New York, pemimpin direksinya mungkin saja orang Jerman, karyawannya bisa berasal dari negara mana saja, dan lahan kerjanya bisa di negeri seperti Indonesia. Bentuk-bentuk korporat semacam inilah yang kini menjelma menjadi penjajah baru bagi negara-negara tertentu, seperti Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam dan mentalitas para birokratnya jeblok, mudah disuap. Korporat semacam inilah yang mampu membayar pusat-pusat kajian (lewat dana beasiswa untuk riset dan sebagainya) guna melegitimasi kiprahnya. Lebih lanjut Marwan menyatakan hal berikut ini.

Keputusan KPPU telah mendapat sambutan dan dukungan yang luar biasa dari kaum intelektual, mahasiswa, dan para pelanggan seluler. Masyarakat tersadarkan bahwa mereka selama ini diisap oleh sistem yang salah dan rakus, termasuk para penjajah. Di saat yang bersamaan, kita membaca demikian gencarnya Temasek memasang iklan tentang keberhasilan Indosat selama 40 tahun berkiprah di Indonesia, terutama dalam sebulan terakhir ini. Padahal jelas, ini dilakukan dalam rangka kampanye untuk mempertahankan dominasi penjajahnya di Indonesia.

Kita memang tidak mampu membayar lawyer, **pusat-pusat kajian**, atau **pakar** seperti yang dilakukan Temasek, terutama untuk menyosialisasikan keputusan KPPU dan menyuarakan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, melalui tulisan ini pula, kami menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan-kepentingan lain. Rakyat juga harus menjaga harga diri dan martabat bangsa dari dominasi kaum penjajah, mendukung dan mengawal keputusan KPPU dalam berbagai proses hukum, serta mengajukan gugatan kepada lembaga terkait untuk menuntut Temasek membayar denda minimal Rp 6 triliun. Penjajahan tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada orang-orang yang memang menyediakan kepalanya untuk diinjak-injak oleh si penjajah.

Begitulah, kajian poskolonial tidak hanya sebatas permasalahan sastra, tetapi terkait dengan konteks jaringan kekuasaan seperti penguasaan aset-aset negara bahkan ke tingkat yang paling serius seperti proliferasi senjata nuklir. Logika bagi Amerika bahwa kepemilikan senjata nuklir hanya bagi kulit putih dan terlarang bagi Iran untuk memilikinya adalah jelas-jelas pandangan poskolonial. Lewat proliferasi nuklir Amerika mendefinisikan keamanan nuklir bagi sekutunya dan bahaya nuklir bagi negara atau pihak lawan. Sayangnya Amerika kini memandang musuh utamanya adalah Islam (baca: teroris). Bagaimana Amerika melarang negara lain untuk memiliki senjata nuklir dan setengah mati melarang Iran atau Korea Utara untuk memproduksinya. Amerika memfasilitasi pengurangan senjata nuklir. Ironisnya pemilik nuklir terbesar ada di Amerika. Persepsi tentang nuklir dan siapa saja yang memilikinya adalah permasalahan yang sangat pelik. Bukan karena dominasi Amerika dalam menentukan siapa yang boleh memiliki dan siapa yang tidak boleh memilikinya, tetapi karena ledakan nuklir bisa menghancurkan dunia.

Arundhati Roy mengupas permasalahan nuklir ini dari perspektif poskolonial dengan tajam manakala India memasuki abad nuklir bersaing dengan tetangga serumpun sekaligus rivalnya, Pakistan yang sama-sama berlomba menguasai senjata nuklir. Menurut Arundhati Roy yang sekaligus juga mengkritisi kepemilikan senjata nuklir bagi negara ketiga sebagaimana dikutip Maya Jairam, bahwa hal itu menunjukkan sikap ambivalensi poskolonial.

The emergence of nuclear proliferation in third world and developing countries has left many stunned, particularly those with the greatest global power. Simultaneously, the very countries that are now causing waves of global unrest are laughed at for not only their attempts at empowerment and attempts to forge national identities, but also for proving, in Roy's analysis, how unstable and in need of guidance they are; the extent to which they are what they protest most: "We storm the heart of whiteness, we embrace the most diabolical creation of Western science and call it our own. But we protest against their music, their food, their clothes, their cinema and their literature."

Nuclear proliferation, for Roy, signifies not only that which it was intended to eliminate, but also, ironically, a re-entry into colonialism: "[O]n August 15 last year we celebrated the fiftieth anniversary of India's independence. Next May we can mark our first anniversary in nuclear bondage."

## Daftar Pustaka

- Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, dan Hellen Tiffin. 2003. *Menelanjangi Kuasa Bahasa: Teori dan Praktik Sastra Poskolonial*. Yogyakarta: Qalam.
- Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, dan Hellen Tiffin. 1995. *The Post-Colonial Studies Reader*. London dan New York: Routledge.
- Bahri, Deepika. 2007 "Introduction to Postcolonial Studies," <http://www.english.emory.edu/Bahri/Intro.html>, diakses 23 November.
- Batubara, Marwan. 2007. "Menggugat Temasek," [www.suaramuslim.net](http://www.suaramuslim.net). diakses 23 November.
- Beya, Abdennebi Ben. 2007. "Mimicry, Ambivalence and Hybridity," <http://www.english.emory.edu>, diakses 23 November.
- Dahlan, Muhidin M. 2001. *Postkolonial Sikap Kita terhadap Imperialisme*. Yogyakarta: Jendela.
- Faruk. 2007. *Belenggu Pasca-Kolonial: Hegemoni dan Resistensi dalam Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, Michel. 2002. Pengetahuan dan Metode Karya-karya Penting Foucault. Yogyakarta: Jalasutra.
- Foucault, Michel. 2002. Kegilaan dan Peradaban, Madness and Civilization. Yogyakarta: Ikon Teralitera.
- Gandhi, Leela. Teori Poskolonial, Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat. Yogyakarta: Qalam, 2001.
- Jairam, Maya. 2007. "Nuclear Proliferation in the Third World: the Heart of Whiteness," <http://www.english.emory.edu/Bahri/nuclear>, diakses 23 November.
- Loomba, Ania. 2003. Kolonialisme/Pascakolonialisme. Yogyakarta: Bentang.
- Mahayana, Maman, Oyon Sofyan dan Achmad Dian. 1995. Ringkasan dan Ulasan Novel Indonesia Modern. Jakarta: Grasindo.
- "Postcolonialism," <http://en.wikipedia.org/wiki/postcolonialism>, diakses 23 November.
- "Postcolonialism literature," [http://en.wikipedia.org/wiki/postcolonialism\\_literature](http://en.wikipedia.org/wiki/postcolonialism_literature), diakses 23 November.
- Rogers, Karl. 2007. "Foucault's Discourse," [www.lancs.ac.uk/depts/philosophy/awayma.ve](http://www.lancs.ac.uk/depts/philosophy/awayma.ve). diakses 23 November.
- Said, Edward W. 2003. *Kekuasaan, Politik, dan Kebudayaan*. Surabaya: Pustaka Prometheus.
- Said, Edward W. 2002. *Covering Islam: Bias Liputan Barat atas Dunia Islam*. Yogyakarta: Ikon Teralitera.
- Said, Edward W. 1995. *Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkas Mitos Hegemoni Barat*. Bandung: Mizan.
- Said, Edward W. 1994. *Orientalisme*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Sylado, Remy. 2005. *9 Oktober 1740: Drama Sejarah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

---

Artikel no 47 dipresentasikan dalam Seminar Rumpun Sastra di FBS UNY, Yogyakarta pada 7 Desember 2007; kode: poskolonial sebuah

---